Journal of Law, Islamic Law, Governance, and Global Justice (JLIGGJ)
Vol. 1, No. 2 (2026)



STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LEBAK: INTEGRASI INFRASTRUKTUR, KETAHAN PANGAN, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN STRUKTURAL

Ratu Diah Wulansari[1], Damanhuri[2], Sahrul Romdoni[3]
Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
ratudiahwulansari2@gmail.com

Abstrak

Pembangunan daerah di Kabupaten Lebak menghadapi tantangan yang kompleks akibat luas wilayah, keterbatasan infrastruktur, kerentanan sosial ekonomi, serta kebutuhan menjaga daya dukung lingkungan. Artikel ini bertujuan menganalisis strategi pembangunan daerah berkelanjutan di Kabupaten Lebak dengan menekankan integrasi pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan struktural. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan daerah, terutama RPJPD Kabupaten Lebak 2025–2045, dokumen Musrenbang RPJPD, KLHS RPJPD, serta publikasi resmi pemerintah daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak menempatkan tiga prioritas pembangunan, yaitu infrastruktur, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan, sebagai fondasi utama pembangunan jangka menengah dan panjang. Infrastruktur berperan sebagai pengungkit konektivitas wilayah dan akses pelayanan dasar; ketahanan pangan memperkuat basis ekonomi perdesaan; sedangkan pengentasan kemiskinan diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan struktural melalui program sosial, ekonomi produktif, dan peningkatan layanan dasar. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fiskal daerah, tingginya belanja wajib, kondisi geografis yang menantang, dan perlunya harmonisasi antar dokumen perencanaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi lintas sektor, penajaman prioritas anggaran, serta integrasi kebijakan berbasis potensi lokal agar pembangunan daerah Kabupaten Lebak lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *pembangunan daerah; Kabupaten Lebak; infrastruktur; ketahanan pangan; kemiskinan struktural; pembangunan berkelanjutan*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses terhadap pelayanan dasar, dan memperkuat daya saing wilayah. Dalam kerangka pembangunan nasional, pembangunan daerah tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembangunan fisik, melainkan sebagai proses transformasi sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan yang menuntut kesesuaian antara kebijakan, potensi lokal, dan kebutuhan masyarakat. Kabupaten Lebak sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Banten menghadapi tantangan pembangunan yang khas, antara lain sebaran penduduk yang tidak merata, tingkat aksesibilitas antarkawasan yang masih timpang,



keterbatasan infrastruktur dasar, dan keberadaan kantong-kantong kemiskinan yang relatif sulit dijangkau.

Dalam dokumen perencanaan jangka panjang, Kabupaten Lebak merumuskan visi pembangunan menuju ‘Lebak Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal’. Rumusan visi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memperkuat sumber daya lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Lebak juga menegaskan pembagian tahapan pembangunan ke dalam fase konsolidasi, akselerasi, ekspansi, dan integrasi, yang menunjukkan adanya orientasi jangka panjang dan bertahap dalam pembangunan daerah.

Kondisi aktual Kabupaten Lebak memperlihatkan bahwa pembangunan daerah masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan struktural, ketimpangan infrastruktur, serta kebutuhan penguatan ketahanan pangan. Pemerintah daerah pada tahun 2026 menetapkan tiga prioritas utama pembangunan, yaitu infrastruktur, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. Penetapan prioritas tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah memandang ketiga aspek tersebut sebagai faktor kunci dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Selain itu, pembangunan daerah yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi memunculkan masalah baru. Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lebak menegaskan bahwa wilayah ini memiliki kerentanan bencana, tantangan topografi, serta pentingnya pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Lebak harus mempertimbangkan dimensi ekologis selain pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan strategi pembangunan daerah berkelanjutan di Kabupaten Lebak dengan menitikberatkan pada integrasi infrastruktur, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan struktural. Artikel ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik sekaligus memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya di wilayah perdesaan dan kawasan yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Lebak.

Pembangunan daerah adalah proses terencana untuk menciptakan perubahan sosial ekonomi yang lebih baik pada suatu wilayah melalui pemanfaatan sumber daya lokal, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam perspektif kebijakan publik, pembangunan daerah harus mampu menjawab kebutuhan aktual masyarakat sekaligus mempersiapkan masa depan daerah yang lebih kompetitif dan berdaya saing. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari perencanaan wilayah, tata kelola pemerintahan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan adil.

Afandi dkk (2022) menegaskan bahwa pembangunan daerah dalam kerangka SDGs harus dioperasionalkan melalui keterhubungan antara kebijakan publik, strategi pembangunan ekonomi, dan prinsip keberlanjutan. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah mengarusutamakan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan.



Alisjahbana dan Murniningtyas (2018) menjelaskan bahwa pencapaian SDGs memerlukan strategi implementasi yang terukur, lintas sektor, dan berbasis indikator. Sementara itu, Rangan dkk (2021) menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia memerlukan penyesuaian kebijakan dengan karakter wilayah dan tantangan implementasi lokal.

Dalam konteks Kabupaten Lebak, pembangunan daerah diposisikan sebagai upaya sinergis antara potensi lokal, seperti pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, dan budaya, dengan kebutuhan percepatan pelayanan dasar. Penekanan pada potensi lokal menjadi penting karena Kabupaten Lebak memiliki basis ekonomi perdesaan yang kuat, tetapi belum seluruhnya terhubung dengan sistem infrastruktur dan pasar yang memadai.

Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebuah pembangunan dikatakan berkelanjutan apabila kebutuhan saat ini dapat dipenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam kerangka ini, pembangunan daerah harus memperhatikan daya dukung lingkungan, risiko bencana, dan kesesuaian tata ruang.

Kabupaten Lebak memiliki karakter wilayah yang rentan terhadap berbagai risiko ekologis, seperti longsor, banjir, gempa bumi, serta keterbatasan ruang hidup di beberapa kawasan. Dokumen KLHS RPJPD menegaskan bahwa proses pembangunan harus mempertimbangkan indeks risiko bencana, kondisi topografi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur, permukiman, dan kegiatan ekonomi tidak boleh melebihi kapasitas lingkungan.

Kemiskinan struktural menjelaskan bahwa kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, dan kebijakan yang membatasi akses masyarakat terhadap kesempatan, aset, dan layanan publik. Dalam banyak kasus, kemiskinan bertahan karena keterisolasian wilayah, rendahnya kualitas infrastruktur, terbatasnya lapangan kerja produktif, dan lemahnya keterhubungan dengan pusat ekonomi.

Di Kabupaten Lebak, data pemerintah daerah menunjukkan masih adanya penduduk miskin ekstrem dalam jumlah yang signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat ditempuh hanya melalui bantuan sosial, melainkan harus disertai pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi produktif, akses air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Pembangunan inklusif menekankan bahwa manfaat pembangunan harus dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan dan wilayah tertinggal. Pendekatan ini relevan bagi Kabupaten Lebak karena tidak seluruh kecamatan memiliki tingkat aksesibilitas yang sama. Karena itu, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan program ekonomi harus dirancang agar tidak hanya menguntungkan pusat pertumbuhan, tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan yang jauh dari pusat kabupaten.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang bersifat alamiah. Sementara itu, Mestika Zed (2018) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data melalui berbagai sumber pustaka yang meliputi membaca, mencatat, mengolah, dan menganalisis bahan-bahan ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, penelitian



ini memanfaatkan berbagai referensi ilmiah sebagai sumber data utama untuk menghasilkan analisis yang komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan menguji hubungan sebab-akibat secara statistik, melainkan memahami arah, logika, dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Lebak berdasarkan dokumen resmi dan sumber informasi yang kredibel.

Sumber data dalam artikel ini terdiri atas dokumen RPJPD Kabupaten Lebak 2025–2045, informasi Musrenbang RPJPD dan RKPD Kabupaten Lebak, dokumen dan ringkasan KLHS RPJPD Kabupaten Lebak, berita resmi dan laporan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lebak, serta literatur buku yang relevan dengan konsep pembangunan daerah dan pembangunan berkelanjutan.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi isu strategis pembangunan Kabupaten Lebak. Kedua, pembacaan tematik terhadap dokumen kebijakan untuk melihat prioritas pembangunan. Ketiga, sintesis konseptual untuk menyusun argumentasi akademik mengenai hubungan antara infrastruktur, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

B. PEMBAHASAN

Kabupaten Lebak menempati posisi strategis dalam pembangunan wilayah Banten bagian selatan. Wilayah yang luas, basis ekonomi perdesaan yang dominan, serta kekayaan sumber daya alam menjadikan Lebak memiliki potensi pembangunan yang besar. Namun, potensi tersebut juga disertai dengan tantangan geografis, sosial, dan fiskal yang tidak sederhana. Dokumen RPJPD menunjukkan bahwa Lebak merupakan kabupaten dengan wilayah yang sangat luas, sehingga kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar menjadi tinggi.

Kondisi geografis tersebut menyebabkan biaya pembangunan menjadi tidak merata. Wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan memerlukan konektivitas jalan, jembatan, air bersih, dan akses layanan sosial yang lebih baik. Tanpa dukungan infrastruktur, potensi ekonomi lokal sulit berkembang secara optimal. Karena itu, pembangunan daerah di Lebak perlu dipahami sebagai upaya menghubungkan wilayah pusat dan pinggiran, bukan hanya membangun pusat pertumbuhan yang terisolasi.

Infrastruktur merupakan prasyarat dasar pembangunan. Jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan bukan sekadar sarana fisik, tetapi juga instrumen integrasi sosial dan ekonomi. Di Kabupaten Lebak, pemerintah daerah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama APBD 2026. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur diposisikan sebagai alat untuk membuka keterisolasian wilayah dan mempercepat distribusi barang, jasa, serta pelayanan publik.

Laporan dan berita kebijakan daerah menunjukkan bahwa pembangunan jalan kabupaten, jalan poros desa, serta jalan antarkecamatan menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Pembangunan infrastruktur jalan dipandang mampu menurunkan biaya logistik hasil pertanian, memperluas akses pasar, dan mendukung mobilitas masyarakat menuju fasilitas pendidikan maupun kesehatan.



Selain jalan, pemerintah Kabupaten Lebak juga memberi perhatian pada air bersih, sanitasi, dan sarana pelayanan dasar lainnya. Pembangunan air bersih di sejumlah desa menunjukkan bahwa infrastruktur dipahami bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebagai instrumen peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pengurangan risiko penyakit.

Ketahanan pangan menjadi prioritas kedua yang sangat penting bagi Kabupaten Lebak. Dalam wilayah dengan basis pertanian dan perdesaan yang luas, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari infrastruktur pertanian, irigasi, akses jalan usaha tani, distribusi hasil panen, serta dukungan sarana produksi. Pemerintah Kabupaten Lebak menyatakan bahwa pada 2026 ketahanan pangan akan diperkuat melalui perbaikan irigasi tersier, pembangunan jalan usaha tani, bantuan sarana pertanian, dan dukungan operasional rice milling unit.

Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi ketahanan pangan di Kabupaten Lebak tidak hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan rantai nilai pertanian. Petani membutuhkan akses jalan yang baik untuk mengangkut hasil panen ke pasar, irigasi yang memadai untuk menjaga produktivitas, dan dukungan sarana produksi agar biaya usaha tani tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, ketahanan pangan juga merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan memiliki tiga dimensi utama. Pertama, ketersediaan pangan, yaitu kemampuan daerah untuk menghasilkan bahan pangan secara cukup. Kedua, akses pangan, yaitu kemampuan masyarakat memperoleh pangan secara fisik maupun ekonomi. Ketiga, stabilitas pangan, yaitu keberlanjutan pasokan sepanjang waktu. Kabupaten Lebak memiliki potensi untuk memperkuat ketiga dimensi tersebut apabila pembangunan pertanian, irigasi, infrastruktur transportasi, dan kelembagaan pangan berjalan sinergis.

Kemiskinan di Kabupaten Lebak tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pendapatan. Pemerintah daerah sendiri menekankan istilah kemiskinan struktural, yaitu kondisi kemiskinan yang dipengaruhi oleh ketimpangan akses, keterisolasian wilayah, dan keterbatasan kesempatan ekonomi. Data yang disampaikan Bapperida menunjukkan adanya 5.698 kepala keluarga atau 30.115 jiwa yang tergolong miskin ekstrem. Angka ini menegaskan urgensi penanganan kemiskinan yang lebih sistematis dan terintegrasi.

Strategi pengentasan kemiskinan di Lebak dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, bantuan sosial, program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pelatihan tenaga kerja, dan perbaikan rumah tidak layak huni. Pendekatan ini mencerminkan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui transfer bantuan, tetapi harus melalui penguatan kapasitas dan perluasan akses masyarakat terhadap sumber daya pembangunan. Dalam praktik pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan struktural perlu dipandang sebagai investasi sosial. Apabila infrastruktur dasar membaik, biaya hidup akan menurun, akses layanan publik meningkat, mobilitas ekonomi membaik, dan peluang kerja bertambah. Oleh karena itu, pembangunan jalan desa, air bersih, sanitasi, dan fasilitas pendidikan di Kabupaten Lebak memiliki dampak langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan Kabupaten Lebak adalah kesadaran terhadap daya dukung lingkungan. Dokumen KLHS RPJPD menegaskan bahwa wilayah Lebak memiliki kerentanan bencana, kondisi topografi yang bervariasi, dan potensi ekosistem yang harus dikelola secara hati-hati. KLHS juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup agar pembangunan tidak justru memperparah risiko



bencana dan degradasi sumber daya alam. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Kabupaten Lebak tidak boleh dilaksanakan secara serampangan. Jalan, permukiman, pengembangan kawasan, dan aktivitas ekonomi harus diselaraskan dengan RTRW, KLHS, dan arah RPJPD. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya menghasilkan output fisik, tetapi juga menjaga keberlanjutan ruang hidup masyarakat. Walaupun prioritas pembangunan sudah jelas, implementasinya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kapasitas fiskal daerah terbatas. Informasi APBD 2026 menunjukkan bahwa PAD Lebak masih rendah dan belanja pegawai cukup besar, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur menjadi terbatas.

Kedua, luasnya wilayah Kabupaten Lebak menyebabkan distribusi pembangunan tidak mudah. Daerah terpencil memerlukan biaya yang lebih besar untuk membangun jalan, jembatan, air bersih, dan layanan publik lainnya. Ketiga, koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat agar program infrastruktur, pertanian, sosial, dan kesehatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Keempat, pembangunan harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan karena beberapa kawasan Lebak rawan bencana.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa implikasi kebijakan. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan anggaran pada program yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, irigasi, dan fasilitas sosial perlu ditempatkan sebagai investasi utama pembangunan. Selain itu, pembangunan daerah di Kabupaten Lebak harus berbasis data dan wilayah. Artinya, intervensi kebijakan tidak boleh bersifat seragam, tetapi harus disesuaikan dengan karakter kecamatan, potensi lokal, dan tingkat kerentanan sosial ekonomi. Pendekatan berbasis wilayah akan membuat kebijakan lebih efisien, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terakhir, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPRD, desa, dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan tidak berhenti pada dokumen perencanaan. Ketika seluruh pemangku kepentingan memiliki orientasi yang sama, pembangunan daerah berkelanjutan di Kabupaten Lebak akan lebih mungkin diwujudkan.

C. KESIMPULAN

Pembangunan daerah Kabupaten Lebak menunjukkan arah yang semakin jelas menuju model pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Tiga prioritas utama, yaitu infrastruktur, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan struktural, merupakan fondasi penting untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiganya saling berkaitan: infrastruktur membuka akses, ketahanan pangan menguatkan ekonomi lokal, dan pengentasan kemiskinan memperluas manfaat pembangunan bagi kelompok rentan.

Namun demikian, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh rumusan kebijakan, melainkan juga oleh kapasitas fiskal, konsistensi implementasi, dan integrasi dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, Kabupaten Lebak perlu terus memperkuat koordinasi lintas sektor, mengarahkan anggaran pada program prioritas, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan sejalan dengan RPJPD, RPJMD, RTRW, dan KLHS.

D. DAFTAR PUSTAKA



Afandi, M. N., Anomsari, E. T., & Novira, A. (2022). *Pembangunan daerah: Tinjauan model konseptual pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* Deepublish.

Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Konsep, target, dan strategi implementasi*. Unpad Press.

ANTARA. (2025, 12 Desember). *Pemkab Lebak tuntaskan kemiskinan lewat pembangunan infrastruktur dan pangan*.

_____. (2025). APBD 2026 *disepakati, Pemkab dan DPRD Lebak fokus ke infrastruktur dan pengentasan kemiskinan*.

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak. (2024). *Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak 2025–2045*.

Pemerintah Kabupaten Lebak. (2024, 28 Maret). *Pj. Bupati Lebak membuka Musrenbang RKPD 2025 dan RPJPD 2025–2045*.

Pemerintah Kabupaten Lebak. (2025). *Kebijakan pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan: Prioritas pembangunan Lebak 2026*.

Pemerintah Kabupaten Lebak. (2024/2025). *Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lebak.*

Rangan, P. R., Tumpu, M., Sudewa, I. B. N., Kusuma, A., & lainnya. (2021). *Implementasi dan implikasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia (target dan strategi)*.

Radar Banten. (2025, 13 November). *Tiga fokus prioritas pembangunan Kabupaten Lebak tahun 2026.*

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.

Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.